

Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Di Desa Pandau Jaya

Nabila Priscillia Phasa¹, Andriyus²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

* nabilapricilliaphasa@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Pandau Jaya dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. SDGs merupakan agenda global yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan, termasuk kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Dalam konteks Desa Pandau Jaya, ditemukan beberapa fenomena yang menghambat implementasi SDGs terutama pada Goals ke-17 Kemitraan Untuk Pembangunan Desa, antara lain kurangnya sumber daya, dana, dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan di desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Selain itu, dilakukan observasi langsung dan analisis dokumen terkait pelaksanaan program SDGs di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDGs di Desa Pandau Jaya, pada Goals ke-17 Kemitraan Untuk Pembangunan Desa belum berjalan maksimal. Kurangnya sumber daya dan dana menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program ini dan inisiatif yang terkait dengan SDGs. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan SDGs masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya SDGs.

Kata kunci: Implementasi, Sustainable, Development Goals

Abstract

This study aims to find out and analyze the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Pandau Jaya Village and identify the factors that hinder its implementation. The SDGs are a global agenda that aims to address various development problems, including poverty, education, health, and the environment. In the context of Pandau Jaya Village, several phenomena were found that hindered the implementation of the SDGs, especially in the 17th Goal of the Partnership for Village Development, including the lack of resources, funds, and community participation. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The data was obtained through in-depth interviews with various stakeholders in the village, including village heads, village officials, and community representatives. In addition, direct observation and analysis of documents related to the implementation of the SDGs program in the village were carried out. The results of the study show that the implementation of the SDGs in Pandau Jaya Village, in the 17th Goal of the Partnership for Village Development, has not been running optimally. Lack of resources and funds is the main obstacle to the implementation of this program and initiatives related to the SDGs. In addition, community participation in supporting and contributing to the achievement of the SDGs goals is still low. This is due to the lack of socialization and public understanding of the importance of the SDGs

Keywords: Implementation, Sustainable, Development Goals

PENDAHULUAN

Hingga akhir abad kedua puluh, kemiskinan tampaknya akan tetap menjadi masalah global. Untuk menanggapi, negara-negara di seluruh dunia mengadakan pertemuan pada September 2000 dan mengeluarkan deklarasi Millenium Development Goal (MDG's). Pengumuman ini mencakup pengurangan 50% dalam tingkat kemiskinan pada tahun 2015. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah produk dari proses inklusif, transparan, dan partisipatif tiga tahun yang membawa 193 negara anggota ke konsensus yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang prioritas pembangunan berkelanjutan. Ini melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat (Permasalahan et al., 2019). Proklamasi ini menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian internasional. Dengan berakhirnya Millennium Development Goals, populasi miskin di seluruh dunia akan berkurang hampir setengahnya. Era Sustainable Development Goals (SDGs) dimulai dengan diselenggarakannya pada 25-27 September 2015, di markas besar PBB di New York, AS. Pada tanggal 2 Agustus 2015, dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diratifikasi di depan perwakilan dari 193 negara. Pada saat itu, dokumen ((Ishartono et al., 2017) yang didukung dengan sangat antusias oleh 193 negara anggota PBB dan berjudul "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan." (Solomon, 2023).

Indonesia, salah satu dari 193 negara yang telah menerima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), harus memasukkan SDGs dalam setiap rencana pembangunan nasionalnya. Tiga prinsip dasar universalitas, integrasi, dan tidak ada yang tertinggal menjadi dasar dari seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Ketiga prinsip panduan ini berfungsi untuk mengawasi implementasi SDGs yang adil dan komprehensif di semua wilayah, untuk menjamin keterkaitan tujuan pembangunan yang dilaksanakan di semua dimensi, dan di atas segalanya untuk menjamin bahwa tidak seorang pun, terlepas dari latar belakang, yang tertinggal. Wahab (dalam Hidayat, 2021) Implementasi mengacu pada memberikan kebijakan cara untuk dipraktekkan dan dapat mempengaruhi atau memiliki pengaruh pada apa pun. Penerapan SDGs sendiri sudah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu modifikasi dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 yang dibuat oleh Perpres adalah pembentukan tim pelaksana untuk mengawasi pelaksanaan dan pencapaian SDGs di tingkat nasional dan daerah. Hubungan antara Sustainable Development Goals (SDGs) dengan pemerintah sangat erat karena SDGs memberikan kerangka kerja yang penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan adalah seperangkat rencana program, kegiatan, keputusan, tindakan, dan sikap yang dilaksanakan oleh para pihak (aktor) dalam upaya mengatasi masalah yang muncul. Menetapkan kebijakan sangat penting untuk keberhasilan organisasi (Iskandar, 2012). Pemerintah menetapkan aturan, mengalokasikan dana, dan mengevaluasi inisiatif dan proyek yang membantu memenuhi tujuan SDGs. Untuk mempromosikan pelaksanaan program dan inisiatif yang bertujuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Gagasan untuk membuat indikator SDGs didasarkan pada tiga fondasi utama. Pertama adalah ukuran pertumbuhan manusia, seperti kesehatan dan pendidikan. Set kedua indikator berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi dan mencakup langkah-langkah seperti

ketersediaan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, aksesibilitas sumber daya alam dan keadaan lingkungan sebaik mungkin termasuk dalam indikator ketiga, yaitu terkait dengan pembangunan lingkungan (Wahyuningsih, 2018)

SDGs adalah inisiatif global yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dunia kontemporer. Tidak hanya tindakan di tingkat nasional dan internasional yang berkontribusi pada keberhasilan mereka, tetapi juga upaya 411ecto termasuk di tingkat desa berkontribusi pada keberhasilan mereka. SDGs Desa adalah upaya untuk memprioritaskan pembangunan berkelanjutan di pedesaan. Visinya adalah menciptakan desa yang makmur, inklusif, dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Misi SDGs Desa melibatkan berbagai aspek, termasuk mengatasi kemiskinan, memberdayakan perempuan, meningkatkan kesehatan dan gizi, meluaskan akses pendidikan, melindungi lingkungan, serta menyediakan akses merata terhadap air bersih dan sanitasi. Sasaran dari SDGs Desa mencakup pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan, mencapai pendidikan universal, meningkatkan kualitas hidup, mengadvokasi kesetaraan gender, dan memperkuat ketahanan lingkungan. SDGs Desa menjadi dasar yang krusial dalam upaya menciptakan pedesaan yang tangguh dan berkelanjutan. Sustainable Development Goals (SDGs) Desa merupakan kelanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, yang menjabarkan rencana pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 2020, SDGs Desa telah diterapkan dan telah menjadi arah pembangunan desa yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan strategi, komitmen, dan pendataan dari bawah ke atas. Mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan tahan lama di tingkat desa adalah tujuan untuk menerapkan Tujuan untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menetapkan kerangka 411ecto pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan konsep Sustainable Development Goals (SDGs). Timeline pencapaian SDGs Desa adalah Desember 2030, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Desa PDTT 21/2020. Salah satu maksud pembuatan pedoman umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Permendes PDTT Nomor 21/2020, adalah untuk berkonsentrasi pada bagaimana strategi perencanaan pembangunan desa harus diarahkan untuk mencapai SDGs desa. Penekanan Permendes PDTT Nomor 21/2020 Pasal 6 Ayat (1) adalah bagaimana SDGs Desa memandu kebijakan pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa (Suprianto, 2023).

Untuk mempromosikan pelaksanaan program dan inisiatif yang bertujuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), masyarakat sipil bekerja dengan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu ini dan memberikan dukungan. Sektor bisnis didukung oleh baik filantropi maupun pelaku korporasi. SDGs dicapai melalui penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat (Amirya & Irianto, 2023). Langkah pertama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah pada pengumpulan data SDGs Desa. Meskipun proses ini melibatkan indikator dan serangkaian proses, desa-desa yang berupaya mengimplementasikan program SDGs Desa sering menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan keterlibatan masyarakat. Pelaksanaan pendataan SDGs Desa, sesuai dengan ketentuan Kemendesa tentang pemberdayaan masyarakat desa, seringkali sulit dilakukan secara individual oleh perangkat desa. Sebagian besar desa di Indonesia mengalami keterbatasan SDM, dan tugas pokok perangkat desa yang berat mempersulit

pelaksanaan pendataan SDGs Desa dalam waktu singkat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi suatu kebutuhan penting untuk mendukung pelaksanaan pendataan SDGs Desa (Kurniawan & Artisa, 2023).

Desa Pandau Jaya telah melakukan penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sejak tahun 2021. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 yang membahas amanat pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa, Desa Pandau Jaya ikut ambil bagian dalam implementasi SDGs. Desa Pandau Jaya merupakan salah satu desa yang terlibat untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), sebuah agenda global yang dimulai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Salah satu tujuan utama dari SDGs Desa ini adalah goal ke-17, yaitu “Kemitraan untuk Pembangunan Desa.” Tujuan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Sector swasta, dan masyarakat untuk mencapai target-target pembangunan yang berkelanjutan. Di Desa Pandau Jaya, pelaksanaan kemitraan untuk pembangunan desa atau (SDGs-17) menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Menurut data yang dikumpulkan, capaian untuk tujuan ini adalah 0%, menandakan bahwa inisiatif kemitraan belum berjalan optimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan kenyataan di lapangan.

Table I
Capaian Ke-17 SDGs Desa Pandau Jaya

Program GOALS 17 (Kemitraan Untuk Pembangunan Desa) Data Desa PANDAU JAYA				
Indikator	Sasaran	Skor	Volume	Satuan
17.1	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun	0	0	-
17.2	Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional	0	0	-
17.3	Tersedia data SDGs setiap tahun	0	0	-

Sumber : Kantor Desa Pandau Jaya 2024

Dari data diatas dapat dilihat capaian Goal ke 17 dari SDGs Desa di Desa Pandau Jaya sampai saat ini masih 0 %. Pada dasarnya, kemitraan untuk pembangunan desa ini sangatlah penting karena ini adalah cara untuk melaksanakan dan meningkatkan kerja sama desa untuk mencapai setiap tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi sangat disayangkan program ini belum begitu berjalan di Desa Pandau Jaya.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan ditemukan beberapa fenomena yaitu:

1. Adanya indikasi data yang tidak di update pada pendataan Sustainable Development Goals (SDGs), karena pihak desa kekurangan sumber daya sehingga program untuk Goal SDGs 17 ini tidak berjalan.
2. Pihak desa mengalami keterbatasan dana untuk melaksanakan program SDGs.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat desa terhadap SDGs.

METODE PENELITIAN

Untuk menggambarkan dan menganalisis suatu peristiwa, penulis menggunakan semacam studi kualitatif deskriptif, dengan menganalisis fakta, realitas, kejadian, aktivitas, keterlibatan manusia, perilaku, dan berbagai persepsi dan sudut pandang.

Menurut Creswell (Satori, Djam'an dan Komariah, 2009) penelitian kualitatif adalah proses investigasi yang didasarkan pada beberapa tradisi metodologis. Informan kunci adalah orang atau organisasi tertentu dengan keahlian mendalam atau pengalaman khusus tentang masalah yang sedang diteliti. Kepala Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, adalah informan utama studi ini. Informan untuk penelitian ini adalah warga Desa Pandau Jaya di Kabupaten Siak Hulu serta kasi pemerintahan dan perencanaan di sana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), Edward III mengidentifikasi empat variabel penting yang dapat digunakan untuk menilai kinerja implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Pandau Jaya, yang terletak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar: struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Hasilnya, penulis akan melaporkan temuan penelitian dengan menggunakan metode wawancara seperti yang disebutkan di bawah ini. Keempat indikator di atas akan menentukan efektivitas implementasi Implementasi Sustainable Development Goals Desa di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar:

1. Komunikasi

Dalam menjalankan kebijakan dengan baik, Pelaksana perlu menyadari tanggung jawab mereka. Kelompok sasaran harus dibuat sadar akan maksud dan tujuan kebijakan untuk meminimalkan variasi implementasi. Dewan Pengarah diberi wewenang untuk memberikan panduan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 membahas bagaimana melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan. sebagaimana tercantum dalam pasal 19. Indikator komunikasi dapat dirujuk ke aturan ini. Salah satu jenis komunikasi yang digunakan untuk melaksanakan SDGs adalah yang satu ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang terlihat bahwa sosialisasi SDGs mengenai Kemitraan Untuk Pembangunan Desa ini masih perlu ditingkatkan. Tantangan utama dalam hal ini adalah kurangnya dana, sumber daya, dan keterlibatan masyarakat. Peneliti juga melihat bahwa kejelasan tujuan dalam pelaksanaan SDGs sudah cukup jelas, yaitu untuk mengurangi kesenjangan, ketimpangan ekonomi dan social di tengah masyarakat desa sehingga nantinya bisa mendorong ekonomi di desa dan kesejahteraan dan sehingga target SDGs ini dapat tercapai.

Peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pandau Jaya belum maksimal, sehingga kejelasan tujuan dalam menjalankan program SDGs ini belum begitu tercapai. Sosialisasi hanya pernah dilakukan sekali, pada tahun 2021. Sehingga dalam hal ini masyarakat menjadi tidak peduli bahkan ada yang tidak mengenal apa itu SDGs dan apa pentingnya bagi desa dan kehidupan masyarakat.

2. Sumber Daya

Kebijakan harus memasukkan sumber daya juga setelah dibuat jelas. Sumber daya akan mendukung program dan merupakan bagian penting dari kebijakan. Kelompok sumber daya ini dapat mencakup hal-hal seperti personel, mesin, pendanaan, dan

sumber daya otoritas. Tujuan sumber daya adalah untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya manusia Desa Pandau Jaya tidak mencukupi untuk mengimplementasikan SDGs. Sumber daya manusia yang kurang dalam melakukan pendataan ataupun pengupdatean data yang baru mengakibatkan program-program SDGs belum berjalan tanpa adanya kelengkapan data dari masyarakat.

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti terhadap indikator sumber daya, dapat disimpulkan bahwa Implementasi SDGs di Desa Pandau Jaya terhambat oleh ketersediaan dana dan sumber daya manusia. Kombinasi yang seimbang antara anggaran yang memadai dan komponen penting untuk memastikan bahwa SDGs dapat dicapai dengan sukses dan berkelanjutan adalah memiliki sumber daya manusia berkualitas tinggi. Tanpa anggaran dan sumber daya manusia yang memadai, program-program SDGs hanya akan menjadi wacana tanpa implementasi yang nyata.

3. Disposisi

Disposisi yang mengacu pada Kecenderungan perilaku dasar atau sifat-sifat pelaksana kebijakan yang menjamin implementasi kebijakan yang tepat sesuai dengan tujuan atau sasaran mereka.

Berdasarkan dari hasil wawancara adalah jelas bahwa para pelaksana di Desa Pandau Jaya memiliki sikap yang sangat positif dan berdedikasi untuk mencapai SDGs, tetapi tantangan terbesar mereka adalah kurangnya dana, sumber daya, dan keterlibatan masyarakat. Peneliti melihat bahwa respon dari kelompok sasaran SDGs ini cukup baik, akan tetapi ada juga masyarakat yang masih belum merasakan dampak dari program Kemitraan Untuk Pembangunan Desa ini. Masyarakat ini hanya ingin terlibat jika salah satu program menguntungkan bagi dirinya sendiri.

Kesimpulan yang dapat diambil dari indikator disposisi ini adalah terdapat berbagai macam respon dan tingkat keterlibatan kelompok sasaran terhadap program-program SDGs. Prioritas dan kepentingan masyarakat terhadap program-program SDGs dapat bervariasi tergantung pada latar belakang, kebutuhan, dan kondisi lokal mereka. Sehingga, hal ini mempengaruhi tingkat partisipasi dan dukungan terhadap implementasi SDGs.

4. Struktur Birokrasi

Struktur dan prosedur organisasi yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi lain untuk mengawasi, merencanakan, dan melaksanakan tugas dan kebijakan administrasi dikenal sebagai struktur birokrasi.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti pembagian tugas sudah cukup jelas, akan tetapi ada beberapa dari perangkat desa yang kewalahan dalam menjalankan tugasnya dikarenakan tumpang tindih tanggung jawab yang diberikan. proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan SDGs, peneliti melihat bahwa pihak desa jarang melakukan monitoring dan evaluasi. Selain dikarenakan tugas yang tumpang tindih, pihak desa kekurangan tenaga untuk membantu proses pendataan untuk program ini. Data yang sudah diberikan dari RT/RW ke pihak desa harus dimasukkan ke system,

lalu pihak desa juga menyediakan kuesioner untuk memperoleh data tersebut dari masyarakat.

Kesimpulan dari indikator struktur birokrasi ini adalah pihak desa dalam pembagian tugas sudah terstruktur, akan tetapi terjadi tumpang tindih perangkat desa dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kemudian, proses monitoring penting untuk melakukan koordinasi yang baik antara berbagai level birokrasi, seperti pemerintah desa, instansi terkait, RT/RW, dan masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi progres SDGs.

SIMPULAN

Untuk menilai seberapa baik implementasi SDGs dilaksanakan di Desa Pandau Jaya terutama pada Goal Kemitraan Untuk Pembangunan Desa, studi ini akan berkonsentrasi pada empat indikator utama: struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDGs Desa Pandau Jaya belum berjalan semulus yang seharusnya. Dalam pelaksanaan SDGs di Desa Pandau Jaya Terdapat kekurangan dalam penyebaran informasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat mengenai tujuan dan manfaat SDGs. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan SDGs. Desa Pandau Jaya juga berjuang dengan kurangnya infrastruktur, uang, dan tenaga kerja untuk membantu implementasi SDGs. Keterbatasan ini menghambat berbagai program dan inisiatif yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirya, M., & Irianto, G. (2023). TANTANGAN IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SGDs) DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 187–198. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38916>
- Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1), 126–136. <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>
- Ishartono, I., Rusyidi, B., & Raharjo, S. T. (2017). Potret Orang Miskin Dari Perspektif Kekuatan. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13816>
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Kurniawan, M. R., & Artisa, R. A. (2023). STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) STRATEGIES FOR INCREASING COMMUNITY PARTICIPATION IN THE PLANNING OF VILLAGE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs). CASE STUDY : CIBURIAL VILLAGE , CIMEN. 11(1).
- Permasalahan, A., Strategis, I., Kebijakan, D., & Mojokerto, K. (2019). *Kabupaten Mojokerto (Markus Patiung)*. 19(1), 33–52.
- Satori, Djam'an dan Komariah, A. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Solomon, B. D. (2023). Sustainable Development Goals (SDGs). *Dictionary of Ecological Economics: Terms for the New Millennium*, 0042, 526–527.

<https://doi.org/10.4337/9781788974912.S.104>

Suprianto, T. (2023). Pendampingan Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2022 di Desa Ngadirejo Magelang. *Jurnal Bina Desa*, 4(3), 409–418.
<https://doi.org/10.15294/jbd.v4i3.40747>

Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Development Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *Bisma*, 11(3), 390.
<https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479>

